

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG DI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) KOTA SURABAYA**

**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH
(RSDK) DI KOTA SURABAYA TAHUN 2011- 2015**



Oleh:

**SILMI MUNA
NIM. 101611133235**

**DEPARTEMEN BIostatistika dan KEPENDUDUKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) SURABAYA**

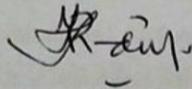
Disusun Oleh :

**SILMI MUNA
NIM.101611133235**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

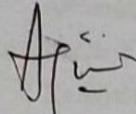
Tanggal 12 Februari 2020



Dr. Rachmah Indawati, S.KM., M.KM.
NIP 19660525 199303 2 002

Pembimbing di BAPPEKO Surabaya

Tanggal 12 Februari 2020

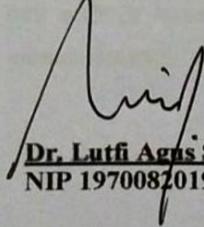


Nina Anggreni, ST
NIP 198001032011012006

Mengetahui

Tanggal 12 Februari 2020

Ketua Departemen Biostatistika dan Kependudukan



Dr. Lutfi Agns Salim, SKM,M.Si
NIP 197008201997021001

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya laporan magang dengan judul “Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Di Kota Surabaya Tahun 2011- 2015”. Laporan magang ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Rachma Indawati, S.KM., M.KM. selaku dosen pembimbing magang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah membimbing selama proses magang dan penyusunan laporan magang hingga selesai. Penulis menyampaikan terima kasih pula kepada pihak yang membantu pelaksanaan magang, yaitu:

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., MS, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga,
2. Dr. Lutfi Agus Salim, SKM,M.Si, selaku Ketua Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. Dr. Rachma Indawati, S.KM., M.KM., selaku koordinator magang Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga,
4. Lucia Y. Hendrati, S.KM., M.Kes. selaku Ketua Koordinator Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
5. Nina Anggreni, ST. selaku pembimbing magang instansi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota BAPPEKO Kota Surabaya.
6. Seluruh Staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang telah membimbing selama proses magang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan magang ini berguna bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, 12 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Manfaat.....	3
1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa	3
1.3.2 Manfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota.....	3
1.3.3 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).....	5
2.2 Kawasan Kumuh	5
2.3 Kemiskinan.....	6
2.4 Pemberdayaan Masyarakat	6
2.5 Partisipasi Masyarakat.....	6
2.6 Tujuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).....	6
2.7 Faktor Pendorong dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program RSDK	7
BAB III METODE KEGIATAN MAGANG.....	9
3.1 Lokasi Magang.....	9
3.2 Waktu Magang.....	9
3.3 Metode Pelaksanaan Magang	9
3.5 Teknik Pengumpulan Data	10
3.6 Analisis Data.....	10
3.7 Output Kegiatan	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)	12
4.1.1 Profil dan gambaran umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)	12
4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pembangunan Kota (BAPPEKO)	12
4.1.3 Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Surabaya.....	14

4.1.4 Tugas dan Fungsi Badan perencanaan dan pembangunan kota (BAPPEKO).....	16
4.1.5 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)	16
4.2 Gambaran Rehabilitas Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya	18
4.2.1 Gambaran kawasan kumuh di Kota Surabaya.....	18
4.2.2 Persentase Luas Kawasan kumuh Kota Surabaya	24
4.2.3 Gambaran Implementasi RSDK di Kota Surabaya	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29
Lampiran	viii

Daftar Tabel

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jadwal Pelaksanaan Magang di BAPPEKO	9
4.1	Daftar Kawasan Prioritas Penataan Pemukiman Kota Surabaya	19
4.2	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2011-2015	20
4.3	Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya	21
4.4	Lokasi Rumah Susun di Kota Surabaya	22
4.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surabaya	25

Daftar Gambar

Nomor	Judul Gambar	Halaman
4.1	Struktur Organisasi BAPPEKO	13
4.2	Diagram Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	21
4.3	Diagram Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya	22
4.4	Penetapan Indikaor Kinerja Terhadap Capaian Kinerja	25

Daftar Lampiran

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Catatan Kegiatan dan Daftar Hadir Magang	viii
2	Dokumentasi Kegiatan	X
3	Peta Persebaran Kawasan Prioritas Di Kota Surabaya	xii
4	Surat Izin Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat	xiii
5	Surat Izin Magang Bakesbangpol Kota Surabaya	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program magang merupakan kegiatan mandiri mahasiswa yang dilakukan di luar lingkungan kampus untuk mendapatkan kesempatan belajar serta menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung sesuai dengan bidang peminatan. Metode pelaksanaan magang bisa sebagai partisipasi aktif ataupun observasi. Pelaksanaan kegiatan magang disesuaikan dengan formasi struktural dan fungsional pada instansi tempat magang, baik pada lembaga pemerintah, lembaga swadaya Masyarakat (LSM), maupun perusahaan swasta atau lembaga lain yang sesuai. Dalam pelaksanaan magang setiap mahasiswa harus mengetahui apa yang menjadi fungsi, tugas, kewajiban dan pekerjaan pokok dari institusi tempat magang, yang relevan dengan keilmuan kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa diharuskan mengambil salah satu topik untuk dipelajari dan disajikan dalam laporan magang. Salah satu topik yang diangkat dalam laporan ini adalah mengenai masalah Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya.

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan telah menjadi daya tarik terkuat bagi masyarakat di daerah penyangga, terutama daerah pedesaan di sekitar kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya dari hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 2.765.487 jiwa. Namun perkembangan pesat kehidupan perkotaan seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota, sehingga mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa, angka kemiskinan tahun 2010 mencapai 112.465 keluarga miskin. Hal ini diperjelas dengan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kota Surabaya.

Penduduk imigran yang berdatangan ke Kota Surabaya dikarenakan Kota Surabaya memiliki posisi geografis dimana pemukiman pantai menjadikan Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan pemukiman. Kota Surabaya memiliki peranan besar dalam menerima dan mendistribusikan barang-barang industri, peralatan teknik, hasil-hasil pertanian, hasil hutan, sembako, dan sebagainya terutama bagi wilayah Indonesia Timur.

Banyaknya imigran yang berdatangan menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Surabaya menjadi tinggi, faktor lapangan pekerjaan dan fasilitas yang cukup lengkap membuat para imigran memilih untuk singgah sementara karena faktor pekerjaan atau bahkan

menetap tinggal di Surabaya. Hal ini bisa menyebabkan Kota Surabaya mengalami bermacam-macam permasalahan seperti tingginya angka kemacetan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan tempat pemukiman yang semakin menyebar luas dan makin kumuhnya pemukiman. Peningkatan semua aspek kegiatan dengan diikuti pertumbuhan penduduk kota yang cukup besar akan menambah segala bentuk dan jenis gangguan, semakin padatnya kendaraan bermotor di jalan kota, semuanya sangat mempengaruhi klimatologi lingkungan kota. Permasalahan tersebut untuk membuat banyaknya lahan di Kota Surabaya yang dialih fungsikan demi memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya.

Padatnya penduduk Kota Surabaya mengakibatkan tingkat kenyamanan penghuni lingkungan kota menurun. Dengan semakin padatnya lingkungan kota dan akibat dari pencemaran udara, akan mempengaruhi suhu udara, radiasi matahari, kelembapan udara serta aliran kecepatan angin lokal. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya denisifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal ini menyebabkan meningkatkan kebutuhan permintaan ruang khusus bagi tempat permukiman para penduduknya.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya merupakan salah satu program yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Salah satu upaya Pemerintah Surabaya dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Di mana program RSDK merupakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dimana masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program. Sehingga keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam pencapaian serta bagaimana perkembangan perubahan kondisi pada masyarakat sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai Gambaran Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum laporan magang ini adalah memperoleh pengalaman, ketrampilan, penyesuaian sikap, serta penghayatan dunia kerja dalam rangka meningkatkan

pengetahuan, sikap dan ketrampilan di bidang ilmu Kesehatan masyarakat khususnya bidang biostatistika serta melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama tim sehingga diperoleh manfaat yang bias dirasakan baik bagi peserta magang maupun bagi lingkungan BAPPEKO Kota Surabaya serta mengetahui gambaran Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun beberapa tujuan khusus dari penulisan laporan magang ini, antara lain :

- a. Mengetahui dan mempelajari gambaran umum dan visi misi di BAPPEKO Kota Surabaya
- b. Mempelajari struktur organisasi dan program kerja Di BAPPEKO Kota Surabaya
- c. Untuk mengetahui gambaran Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh kesempatan dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dan yang belum dipelajari selama perkuliahan di dunia kerja, khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya
- b. Memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan *soft skill*, pengalaman, dan penyesuaian sikap dalam dunia kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
- c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya
- d. Memberikan pengetahuan mengenai gambaran Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya

1.3.2 Manfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

1. Mengetahui tugas pokok Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam aplikasinya di dunia kerja serta memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.
2. Membantu instansi dalam menyelesaikan suatu job desk dan permasalahan yang dihadapi oleh instansi dan sebagai sarana untuk menjembatani antara instansi

dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut yang bersifat akademik maupun non akademik.

3. Untuk memperkenalkan Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya ilmu Biostatistika dan kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga kepada Badan Usaha yang membutuhkan lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat.

1.3.3 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

- a. Memberikan pembelajaran dan pengalaman kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan institusi magang sehingga dapat mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi
- c. Memperoleh informasi dan dokumentasi ilmiah tentang kondisi nyata dunia kerja yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat
- d. Memberikan gambaran mengenai kemampuan mahasiswa dalam mengkaji dan menganalisis data yang ada di BAPPEKO Kota Surabaya.
- e. Menjadikan laporan magang sebagai sumber referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengangkat topik yang sama dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja instansi terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya adalah program yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga miskin agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri. Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh (RPJM)

Terkait dengan mekanisme program RSDK, bahwa pelaksanaan program RSDK diawali oleh adanya musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Usulan Musrenbang tingkat kelurahan ini kemudian diajukan ke dalam usulan Musrenbang tingkat kota yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Hasil survey yang telah dilaksanakan oleh tim dari Bappeko kemudian diberikan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan survey kembali dengan tujuan untuk mengetahui bahwa masyarakat yang menerima program RSDK memang memiliki kondisi rumah yang masih memerlukan bantuan umum untuk diperbaiki dan memenuhi syarat. (Kumuh and Di, 2015)

2.2 Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. (Niken Fitria and Rulli Pratiwi Setiawan, 2014)

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan

permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung program nasional 100-0-100. (RPJM)

2.3 Kemiskinan

Menurut definisi World Bank, 1990 (dalam Suryono, 2010, h.233) kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep ini merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Menurut Chambers (1987), kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidak pastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat.(Nugrahani, Soeaidy and Ribawanto, 2013)

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suryono (2010, h.262), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Sedangkan menurut Friedman, 1992 (dalam Suryono, 2010, h. 260), menyatakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan dari kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang lain. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari kekuatan masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan peningkatan kemandirian masyarakat dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet, 1980 (dalam Suryono, 2010, h.256) diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2.6 Tujuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Sesuai Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2011, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
3. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
4. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

2.7 Faktor Pendorong dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program RSDK

Pada umumnya setiap implementasi suatu program terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang dimana dapat mendukung berjalannya program. Dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasinya. Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan program RSDK adalah dengan adanya dana yang dimana merupakan hal yang sangat penting guna memperlancar kegiatan. Suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai harus dapat mengalokasikan dana dengan baik.

Selain faktor dana dalam mendukung pelaksanaan juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan kerja organisasi. Sarana dan prasarana yang diberikan dalam pelaksanaan program RSDK berupa stimulan-stimulan yang mendukung pelaksanaan program.

Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan program RSDK dipengaruhi dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Di mana masyarakat sulit untuk diajak dalam mengikut kegiatan-kegiatan dalam program RSDK. Sehingga masyarakat harus dibujuk terlebih dahulu untuk benarbenar mau berpartisipasi. Selain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang menghambat, juga dipengaruhi dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengguliran dana. Karena dengan adanya pengguliran dana diharapkan mampu membantu keluarga miskin lainnya. Namun pada kenyataannya masyarakat

beranggapan bahwa dana yang diberikan tidak perlu untuk dikembalikan karena merupakan dana bantuan. Pada kenyataannya pengguliran dana tersebut tidak dikembalikan kepada Dinas Sosial namun dikembalikan dan dikelola kembali oleh lembaga lokal atau UPKM.

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di bidang sosial dan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Surabaya, Jalan Pacar Nomor 8 Surabaya.

3.2 Waktu Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 6 minggu dimulai pada tanggal 19 Desember 2019 -24 Januari 2020. Jadwal kegiatan magang dimulai pada pukul 07.30-16.00 setiap hari Senin-Jumat.

Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan Magang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

Kegiatan	Waktu Kegiatan Magang					
	I	II	III	IV	V	VI
Pengenalan pelaksanaan kantor dan program kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Surabaya						
Melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data di BAPPEKO yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat (kependudukan)						
Pengenalan pelaksanaan program di BAPPEKO						
Mempelajari permasalahan yang terdapat di instansi dan mengambil data yang dibutuhkan pada laporan magang						
Penyusunan Laporan						

3.3 Metode Pelaksanaan Magang

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan magang di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, antara lain:

- a. Observasi yakni pelaksanaan peninjauan dan pengamatan tentang pelaksanaan suatu kegiatan di bidang sosial dan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

- b. Partisipasi yakni ikut secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang sosial dan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- c. Studi literatur yakni metode dengan menggunakan buku atau jurnal terkait penjelasan mengenai permasalahan atau suatu kegiatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Primer

Interview atau wawancara kepada pihak Badan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan BAPPEKO Surabaya.

- b. Sekunder

Data yang digunakan dalam kegiatan magang berupa data sekunder dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Surabaya.

3.6 Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan editing untuk menghindari kesalahan, selanjutnya data dianalisis menggunakan cara deskriptif yaitu berupa narasi yang berisi gambaran program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya. Selanjutnya data yang terkumpul digunakan sebagai dasar dalam menggambarkan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RsdK) Di Kota Surabaya data tersebut dioleh dalam bentuk Microsoft excel yang ditampilkan dalam bentuk diagram agar dapat dianalisis dan diubah menjadi informasi yang bermanfaat.

3.7 Output Kegiatan

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 2019- 24 Januari 2020. Output kegiatan magang yang dihasilkan sebagai berikut:

- a. Pengenalan instansi dan kondisi lapangan

Pengenalan instansi berupa orientasi dari pimpinan BAPPEKO Surabaya. Mempelajari struktur organisasi BAPPEKO Surabaya dan kegiatan di lapangan.

- b. Studi literature

Mencari melalui internet untuk memperoleh referensi dan mencocokkan dengan teori yang berkaitan dengan kondisi di lapangan atau lingkungan tempat magang.

- c. Observasi pengumpulan data dan pelaksanaan tugas

Melakukan observasi untuk mencari keterangan dan informasi yang dapat digunakan untuk laporan magang. Pelaksanaan magang selalu dibimbing oleh pembimbing instansi.

d. Penulisan laporan magang

Penulisan laporan magang dibuat sesuai dengan topik yang hendak ditulis oleh mahasiswanya. Laporan magang tersebut sekaligus sebagai bahan pengendalin dan evaluasi dari hasil pelaksanaan magang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

4.1.1 Profil dan gambaran umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

Badan Perencanaan Pembangunan kota Surabaya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan, BAPPEKO menyusun tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. BAPPEKO Surabaya menyediakan produk perencanaan pembangunan serta informasi spasial kepada publik melalui peta, dengan harapan perencanaan pembangunan kota dapat dilaksanakan berbasis spasial.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

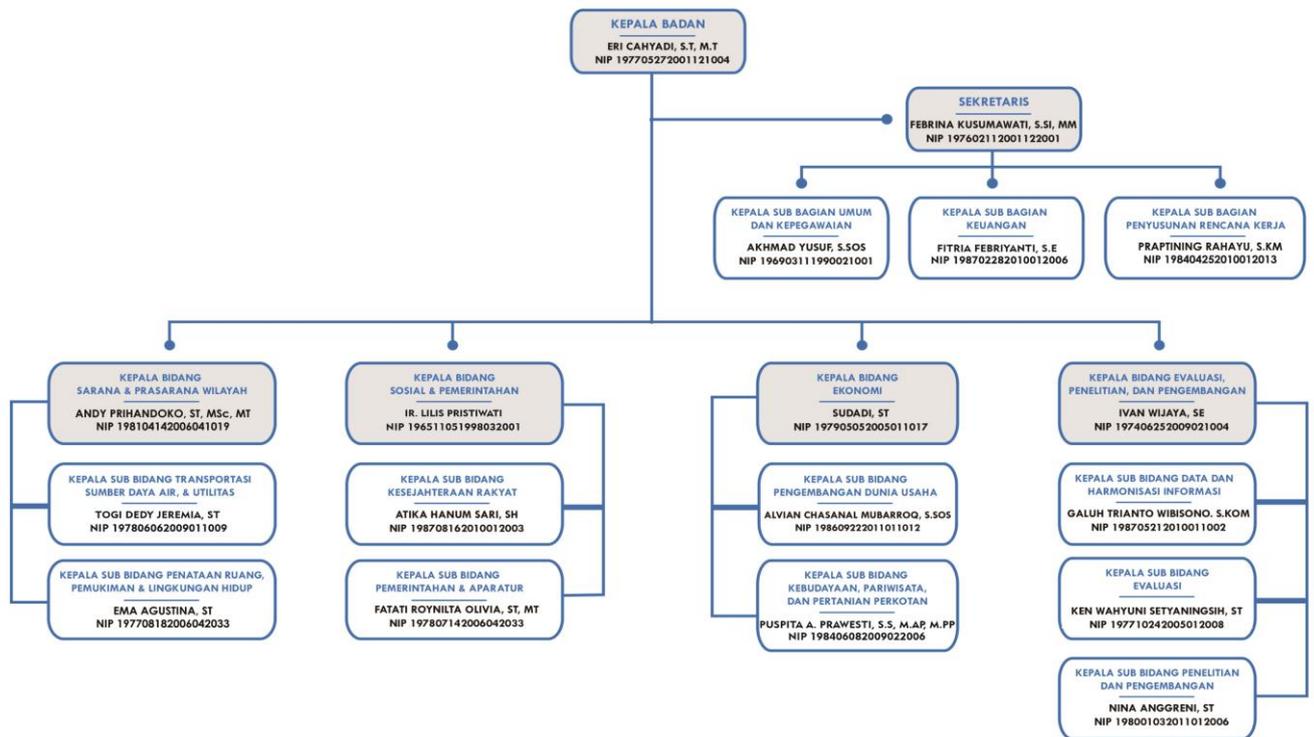
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi: 1) Sub Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, dan Utilitas; 2) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman, dan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi: 1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

e. Bidang Ekonomi, membawahi: 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; 2) Sub Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Pertanian Perkotaan;

f. Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan, membawahi: 1) Sub Bidang Data dan Harmonisasi Informasi; 2) Sub Bidang Evaluasi; 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

4.1.3 Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Surabaya

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Pemerintah Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2016-2021 melakukan 6 program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Ruang Kota;

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu

- 1) Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan
- 2) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun.

Sasaran kota yang diturunkan menjadi tujuan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini adalah Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditunjukkan melalui Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan dokumen rencana tata ruang yang disusun, baik rencana sektoral maupun rencana rinci telah berpedoman dan sinkron kepada Rencana Tata Ruang Wilayah melalui koordinasi yang rutin dengan BKPRD.

2. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik;

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD dengan target sebesar 5% pada tahun 2017 sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran kota yang diturunkan menjadi tujuan PD Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase SKPD yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI, di mana Badan Perencanaan

Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan mendorong pemanfaatannya untuk penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3. Program Pengendalian Pembangunan Daerah;

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output dengan target sebesar 90% pada tahun 2017 sampai akhir periode RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran kota untuk program ini yang diturunkan menjadi tujuan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan adalah “Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan” yang ditunjukkan melalui Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana program dan terutama kegiatan, untuk memastikan Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan sesuai output yang direncanakan, serta sesuai waktu yang telah ditentukan.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sasaran kota untuk program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sehingga dokumen perencanaan yang disusun telah sesuai ketentuan, mengacu dan memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di skala kota, serta disampaikan dan dilaporkan tepat waktu. Di samping itu, Badan Perencanaan Pembangunan juga melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 72% pada tahun 2017; 74% pada tahun 2018; 76% pada tahun 2019; 78% pada tahun 2020; 80% pada tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase

SKPD yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.

6. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan.

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target sebesar 100% pada tahun 2017 sampai akhir tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase SKPD yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.

4.1.4 Tugas dan Fungsi Badan perencanaan dan pembangunan kota (BAPPEKO)

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan lingkungan tugasnya
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4.1.5 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

- 1.) Visi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

Badan Perencanaan Pembangunan memperhatikan kembali permasalahan pembangunan seperti tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, seperti Penataan Ruang, Statistik dan Penunjang Urusan, yaitu Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, yang berkaitan dengan misi-misi yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan.

Perumusan visi Badan Perencanaan Pembangunan juga memperhatikan visi Walikota dan Walikota Surabaya Tahun 2016-2021 seperti tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yaitu:

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Dengan pokok-pokok visi antara lain:

1. Sentosa : Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri
2. Berkarakter: Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila.
3. Berdaya Saing Global: Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
4. Berbasis Ekologi: Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

2.) Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO)

Misi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan untuk mewujudkan visi adalah

“Meningkatkan mutu perencanaan yang integratif dan implementatif berbasis teknologi informasi”.

Seperti yang telah disampaikan dalam penjelasan pokok-pokok visi Badan Perencanaan Pembangunan, perencanaan yang berkualitas ditunjukkan dengan proses perencanaan yang teknokratis, partisipatif, politis dan bottom-up maupun topdown, di mana perencana mempertimbangkan seluruh aspek (sektoral dan lintas sektoral), termasuk aspek spasial; mempertimbangkan masukan dari stakeholder; berdasarkan data dan informasi serta dapat diimplementasikan, dalam hal ini dijabarkan dalam rencana kegiatan di PD Pemerintah Kota Surabaya. Implementatif tidaknya perencanaan yang disusun dievaluasi melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kegiatan dan program terkait.

Untuk mewujudkan perencanaan yang handal, peran teknologi informasi menjadi aspek yang dikedepankan untuk menunjang proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah sesuai dengan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan yang menunjukkan bahwa teknologi informasi menjadi peluang yang baik sebagai pendukung tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Hal ini sangat bermanfaat bagi PD sebagai pengguna layanan Badan Perencanaan Pembangunan, yaitu memudahkan PD untuk mengakses informasi terkait perencanaan pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyusunan rencana di tingkat PD, serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi rencana program dan kegiatan masing-masing.

4.2 Gambaran Rehabilitas Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya

4.2.1 Gambaran kawasan kumuh di Kota Surabaya

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan Provinsi Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100, seperti peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara

lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Meski telah dilakukan secara berkelanjutan, namun keberhasilan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan, yang salah satunya dipicu oleh tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Tabel 4.1 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	

18	Bubutan	Bubutan	PRIORITAS III
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Berdasarkan peta tersebut di atas, terdapat beberapa kawasan permukiman di Kota Surabaya yang masih dalam kondisi kumuh. Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi. Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	420	400	400	602	723



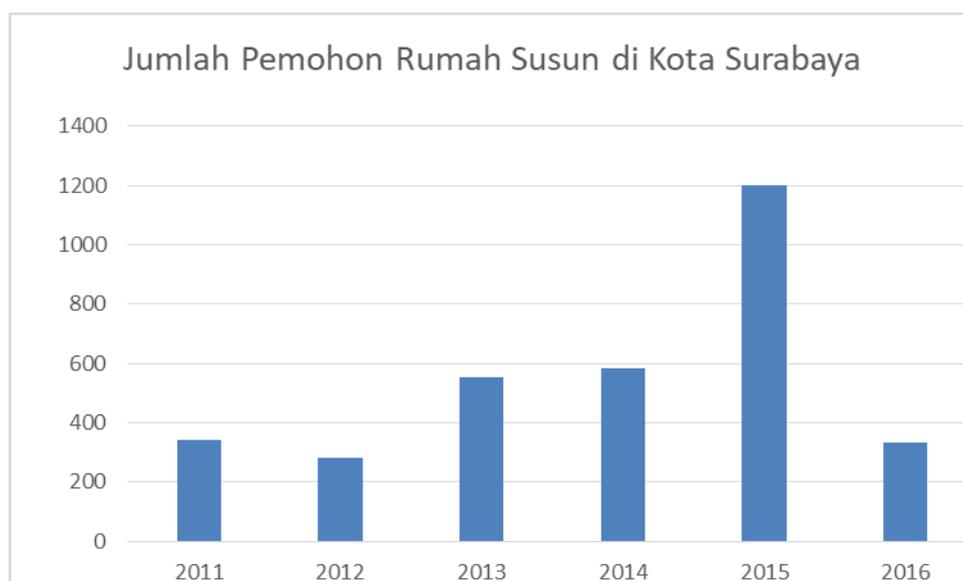
Gambar 4.2 Diagram Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya

Dari gambar 4.2 dapat dihasilkan bahwasannya jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Sedangkan dari tahun 2012 mengalami sedikit penurunan.

Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya dilaksanakan dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap dan penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

No	Tahun	Jumlah Pemohon Rusun
1	2011	340
2	2012	280
3	2013	554
4	2014	583
5	2015	1199
6	2016	334
TOTAL		3290



Gambar 4.3 Diagram Jumlah Pemohon Rumah Susun Di Kota Surabaya

Dalam gambar 4.3 didapatkan bahwa jumlah pemohon rumah susun di Kota Surabaya mengalami fluktuatif naik turun. Dan tahun tertinggi mengalami banyak permohonan rumah susun adalah tahun 2015 sedangkan tahun terendah di tahun 2012.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 78 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 14 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.4 Lokasi Rumah Susun Di Kota Surabaya

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas	Keterangan
					Lahan	
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000 m ²	Dibangun th.1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec.Simokerto	18	10	± 25.000 m ²	Dibangun th.1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec.Simokerto	21	3	± 3.500 m ²	Dibangun th.1975 direhab th.2004/2005

						(APBD I)
4	Penjaring Sari	Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 9.000 m ²	Dibangun th.1995 (APBN)
			21	6	±9.000 m ²	Dibangun th.2004(APBN)
			24	2	±6.000 m ²	Dibangun th.2009 (APBN)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 6.000 m ²	Dibangun th.2004 (APBN)
			21	4	± 6.000 m ²	Dibangun th.2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	±29.845 m ²	Dibangun th.1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 7.640 m ²	Dibangun th.2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	±20.400 m ²	Dibangun th.2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel. Dr Soetomo Kec. Tegalsari	24	2	± 5.000 m ²	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 1.989 m ²	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 3.569 m ²	Dibangun 2011-2012 (APBN)

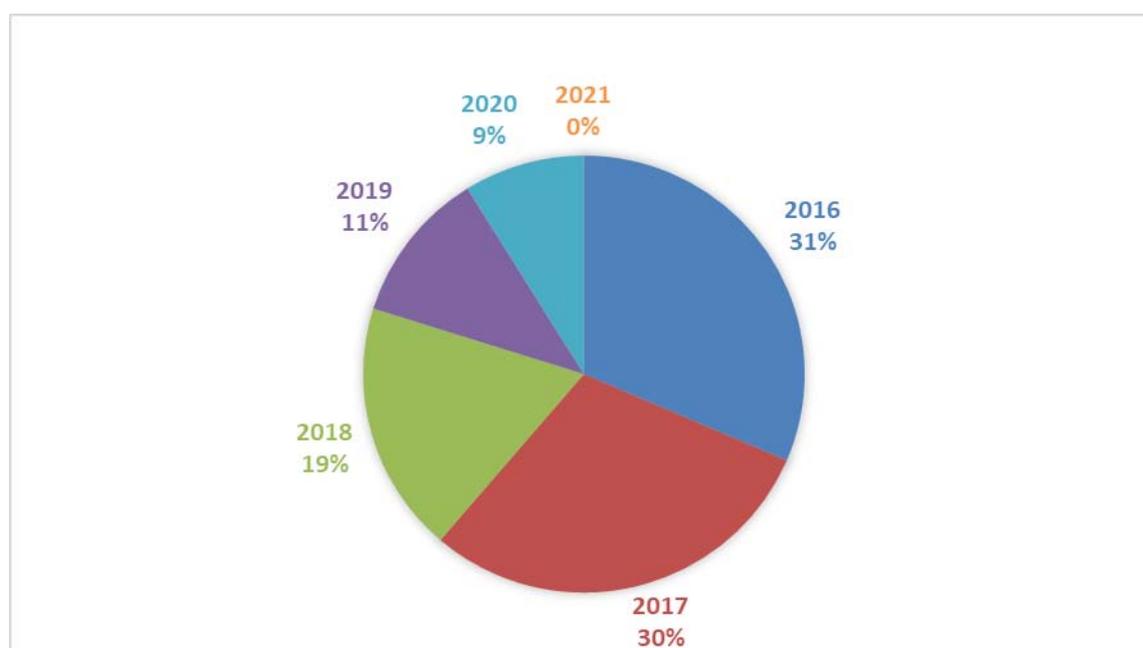
12	TPI/PPI Romokalisari(1- 3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000 m ²	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000 m ²	Dibangun 2013-2014 (APBN)
14	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.000 m ²	Dibangun 2014 (APBN)
Total				78		

4.2.2 Persentase Luas Kawasan kumuh Kota Surabaya

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100, seperti peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman. Meski telah dilakukan secara berkelanjutan, namun keberhasilan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan, yang salah satunya dipicu oleh tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan. (RPJM)

Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surabaya

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD s.d 2015	Target Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase Luas Kawasan Pemukiman Kumuh	0,86%	0,78%	0,74%	0,46%	0,28%	0,22%	0,00%	0,00%



Gambar 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam gambar 4.4 dapat menjelaskan bahwa persentase kawasan kumuh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kota Surabaya tiap tahunnya mengalami penurunan terhadap kawasan kumuh di kota Surabaya terutama di tahun 2021 akan sampai pada angka 0% untuk kawasan kumuh di Kota Surabaya.

4.2.3 Gambaran Implementasi RSDK di Kota Surabaya

Program RSDK merupakan program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk secara mandiri meningkatkan kesejahteraan. Anggaran pelaksanaan program RSDK bersumber dari dana APBD yang di mana dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pelatihan usaha, kegiatan perbaikan rumah dan kegiatan pembentukan dan penguatan lembaga lokal atau UPKM. Sehingga bantuan yang diberikan tidak berupa uang namun berupa kegiatan dan barang. Sasaran program RSDK adalah keluarga miskin yang berdomisili asli di kelurahan tersebut dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dengan kepemilikan tanah tidak dalam kondisi sengketa.

Dalam pelaksanaan program RSDK telah membawa dampak yang berarti kepada masyarakat miskin penerima bantuan, yang dimana perubahan tersebut meliputi perubahan sosial, lingkungan dan ekonomi. Namun dalam perubahan ekonomi dirasa kurang optimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya biaya untuk modal dalam memulai usaha. Oleh karena itu dalam masalah ini Dinas Sosial dan UPKM dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang menangani dalam pengembangan usaha mikro di masyarakat, yang di mana dapat diharapkan membantu dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar. Selain itu faktor pendorong dalam program RSDK adalah adanya dana dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan dalam faktor penghambat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pahami masyarakat akan pentingnya pengguliran dana. Hal ini dapat di atasi dengan mengadakan pertemuan rutin antara UPKM dengan keluarga miskin penerima bantuan secara intensif dalam suasana informal untuk khususnya membahas tentang pelaksanaan program RSDK. Dengan adanya pertemuan rutin diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan masyarakat tentang pentingnya pengguliran dana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Badan Perencanaan Pembangunan kota Surabaya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2. Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100
3. Salah satu upaya Pemerintah Surabaya dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.
4. Program RSDK merupakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang dimana masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program.
5. Keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

5.2 Saran

1. Semakin mengembangkan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di beberapa wilayah prioritas Kota Surabaya
2. Mengoptimalkan fungsi RSDK sebagai acuan pengendalian RSDK sehingga ada pedoman-pedoman yang tepat dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan RSDK
3. Kelengkapan ketersediaan data di BAPPEKO Kota Surabaya masih kurang sehingga disarankan juga dapat melengkapi data tahun-tahun sebelumnya supaya dapat ditelusuri dan dianalisis lebih lengkap terkait transisi demografi dan transisi epidemiologi menurut Kota Surabaya
4. Melakukan pembangunan berbasisi komunitas (pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan)

5. Melakukan program untuk upaya kelembagaan didaerah dalam upaya penegakkan kawasan kumuh
6. Melakukan percepatan pendataan kawasan kumuh dan perencanaan (Gatot and Senayan, 2020)(Program *et al.*, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

Gatot, J. and Senayan, S. (2020) „Population Management Challenges in The City of Surabaya Yulia Indahri“, pp. 1–27.

Kumuh, D. and Di, R. (2015) „IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL“.

Niken Fitria and Rulli Pratiwi Setiawan (2014) „Identifikasi karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat“, *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), pp. 240–244. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/194626-ID-identifikasi-karakteristik-lingkungan-pe.pdf>.

Nugrahani, W. P., Soeaidy, M. S. and Ribawanto, H. (2013) „IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA Widya Putri Nugrahani, M. Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto“, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), pp. 144–149.

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2019

Program, M. *et al.* (2013) „Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya“, 1.

RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021 (PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016)

Lampiran

1. Catatan Kegiatan dan Daftar Hadir Magang

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke-1		
19-12-2019	Mempelajari Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 69 Tahun 2016	
20-12-2019	Mempelajari dan memahami tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota	
Minggu ke-2		
23-12-2019	Mendiskusikan topik mengenai permasalahan yang ada	
24-12-2019	Merumuskan topik laporan magang	
26-12-2019	Memahami Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya	
27-12-2019	Memahami faktor hubungan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)	
Minggu ke-3		
2-01-2020	Mendiskusikan mengenai topik laporan dengan pihak BAPPEKO	
3-01-2020	Mengambil data dari Evalitbang BAPPEKO yang dibutuhkan untuk menggambarkan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)	
Minggu ke-4		
6-01-2020	Mengambil data dari Evalitbang BAPPEKO yang dibutuhkan untuk menggambarkan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)	
7-01-2020	Merapikan data yang sudah didapatkan	
8-01-2020	Pengarahan magang dari Pihak BAPPEKO	
9-01-2020	Merapikan dan mengolah data yang sudah didapatkan untuk dilakukannya penggambaran	
10-01-2020	Mengambil data mengenai peta wilayah kumuh di Surabaya	
Minggu ke-5		
13-01-2020	Mengambil data mengenai rekapan rumah susun di Kota Surabaya	
14-01-2020	Mendiskusikan topic dan pembahasan laporan magang data dengan pihak BAPPEKO	
15-01-2020	Konsultasi dengan pihak BAPPEKO mengenai pengambilan topic dan pembahasan dalam laporan	
16-01-2020	Mengolah data menggunakan excel	
17-01-2020	Merapikan data yang sudah diolah	

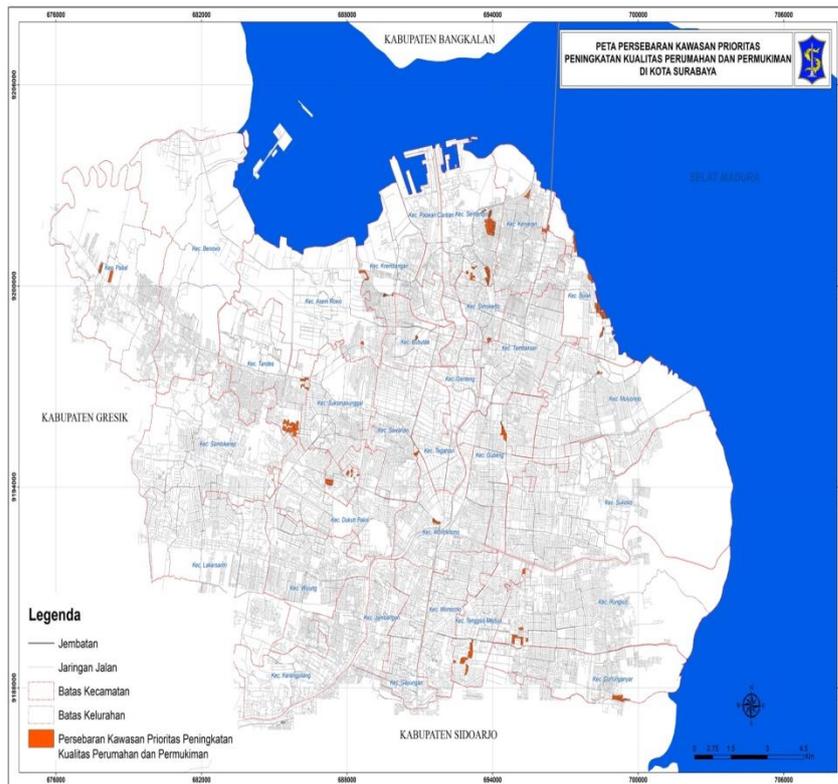
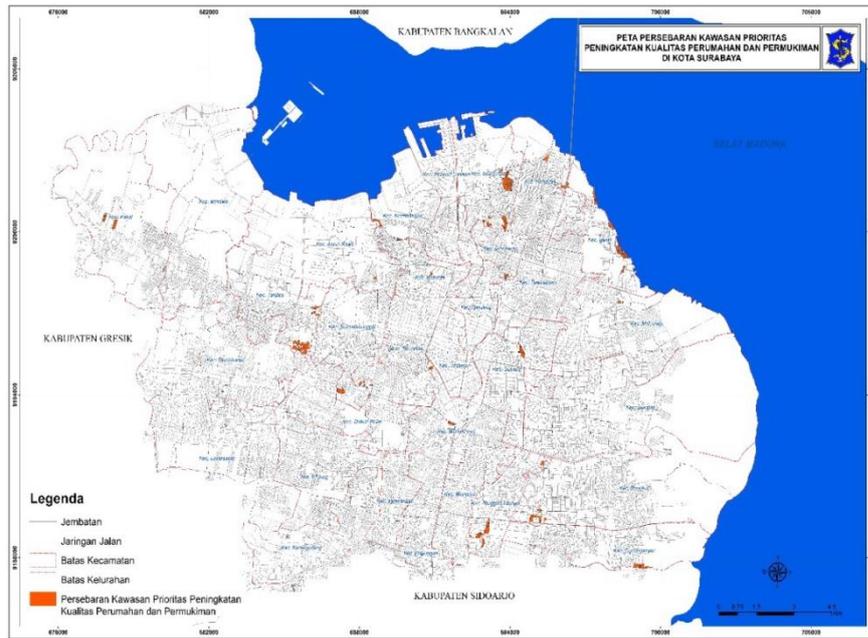
Minggu ke-6		
20-01-2020	Menyusun laporan	✓
21-01-2020	Menyusun laporan	✓
22-01-2020	Menyusun laporan	✓
23-01-2020	Menyusun laporan	✓
24-01-2020	Menyusun laporan	✓

2. Dokumentasi Kegiatan Magang

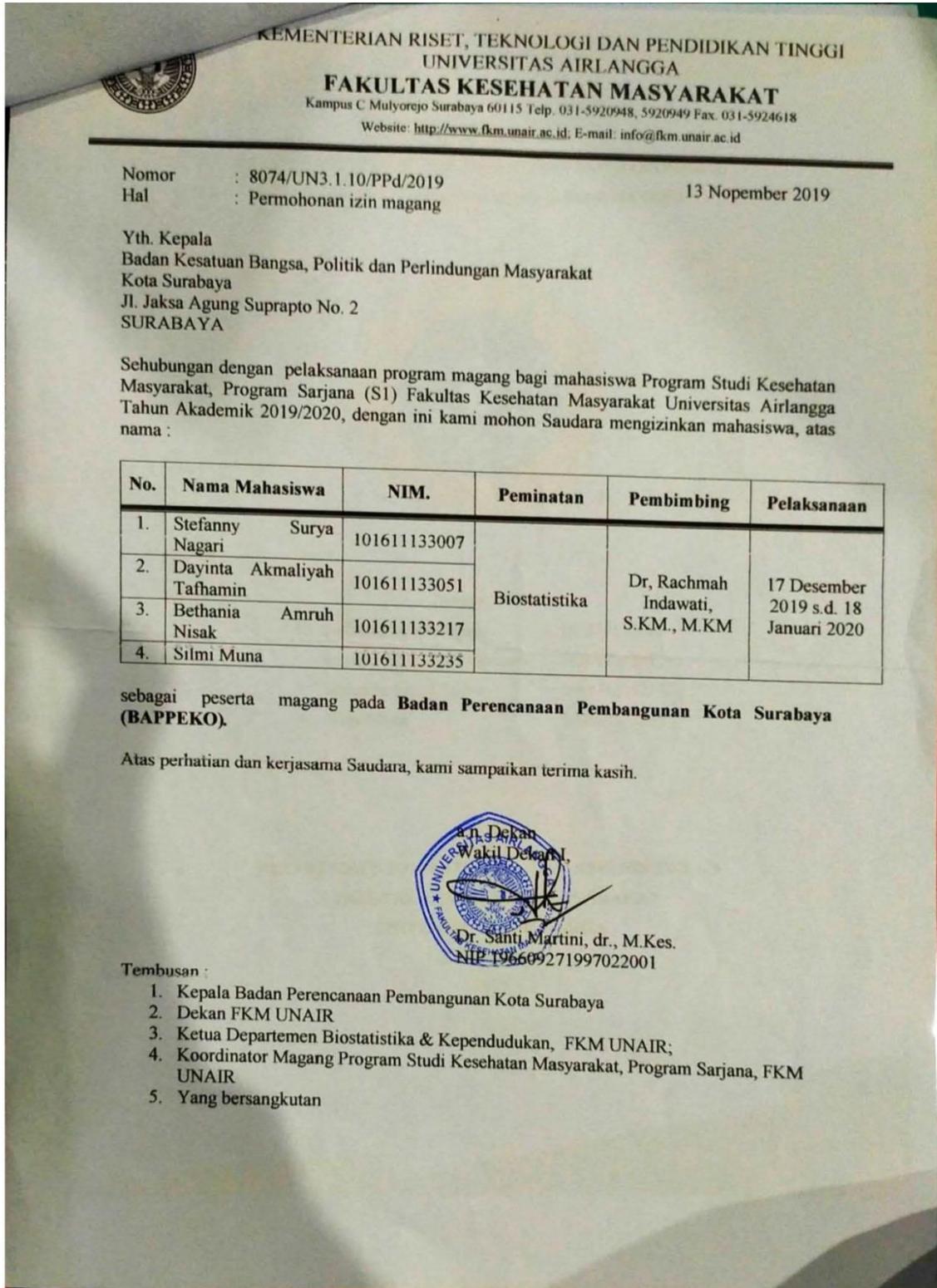




3. Peta Persebaran Kawasan Prioritas Di Kota Surabaya



4. Surat Izin Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga



5. Surat Izin Magang BAKESBANGPOL Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272
 Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 28 November 2019

Nomor : 070/1/436.8.5/2019
 Lampiran : Anggota Peserta
 Hal : Magang

Kepada
 Yth Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya
 di -
SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;

Memperhatikan : Surat Dekan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Nomor 8074/JN3.1.10/2019 ijin Magang

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : Stefanny Surya Nagari
 b. Alamat : Sidosermo 1/10, Surabaya
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya
 e. Kewarganegaraan : WNI

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul/ Tema : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO)
 b. Tujuan : Penelitian
 c. Bidang Penelitian : Magang
 d. Penanggung Jawab : Dr. Rachmah Indawati SKM., M.KM
 e. Anggota Peserta :
 f. Waktu : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan
 g. Lokasi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya

Dengan persyaratan :

1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
2. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
3. Dalam proses pengambilan/penggalian data harap tidak membebani atau memberatkan warga.
4. Setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;
5. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA BADAN

 Dr. Eddy Christijanto Drs., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680731 198809 1 001

Silahkan scan barcode diatas untuk mengecek validitas surat

Tembusan :
 Yth 1. Dekan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya
 2. Saudara yang bersangkutan